



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 21 Juni 2023

Halaman: 1

Bahas Perubahan Perda Kota Jogja Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Minta Anggaran Pendidikan Inklusi Diperhatikan



ASPIRASI MASYARAKAT: Jalannya RDPU Pansus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Kota Jogja mengundang berbagai elemen dan pemangku kepentingan.

PENYELENGGARAAN pendidikan inklusi di Kota Jogja mendapatkan sorotan dari sejumlah pemangku kepentingan. Khususnya dari kalangan pendidikan yang mendesak agar anggaran penyelenggaraan pendidikan inklusi mendapatkan perhatian. Bentuknya diakomodasi dalam anggaran pendidikan.

"Kalimatnya bukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun semua harus ada berdasarkan data. Kalau memang sekolah itu inklusi 15 (orang) atau 20 itu fokuskan anggarannya ke sana,"

pinta Supriyadi yang mewakili SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta.

Supriyadi mengungkapkan itu saat hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RD-PU) yang diadakan Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Yogyakarta di gedung DPRD Kota Jogja pada Jumat (16/6) lalu.

Kondisi di lapangan, sekolah wajib menerima inklusi namun pemerintah tidak menyediakan pendamping. Dampaknya sejumlah sekolah mengalami kesulitan



SURYANI

► Baca Sekolah... Hal 7

Sekolah Minta Anggaran Pendidikan Inklusi Diperhatikan

Sambungan dari hal 1

"Mohon maaf sekolah-sekolah yang dikumpulkan untuk penyelenggara pendidikan inklusi hingga hari ini tidak ada yang mendampingi. Kalau sekolah dipasrahi 15 siswa, harusnya pemerintah daerah ikut memberikan support," pintanya.

Wetub yang datang mewakili Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mempertanyakan prinsip dan dasar dilakukannya perubahan Perda Kota Jogja Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Dari pencerminan Wetub, Perda Kota Jogja No. 5 Tahun 2008 itu justru lebih kompre-

hensif dibandingkan draf raperda perubahan yang sekarang dibahas pansus. "Perda lama mencantumkan adanya sanksi dan banyak hal lainnya. Berbeda dengan draf perubahannya justru tidak mencantumkan hal tersebut," kritiknya.

Jalannya RDPU dipimpin Ketua Pansus Suryani. Tampak beberapa anggota pansus hadir. Antara lain Krisnadi Setyawan, Bambang Anjar Jalumurti, Choliq Nugroho Adji, Ahmad Mufaris, dan Antonius Fokki Ardiyanto.

RDPU dihadiri dari perwakilan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di luar itu ada para penggiat pen-

didikan dan sejumlah LSM. Dari kalangan eksekutif antara lain dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja hingga Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY.

Ketua Pansus Suryani menjelaskan tujuan digelarnya RDPU sebagai salah satu pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD Kota Jogja. Dari acara itu diharapkan dapat diketahui pandangan, masukan dan aspirasi masyarakat. Di dalamnya termasuk laporan menyangkut banyak masalah

di lapangan. Yani, sapaan akrabnya, menilai, pendapat dan masukan dari berbagai elemen masyarakat tersebut tersampaikan dengan baik. Dia mengapresiasi sikap aktif peserta RDPU.

Pimpinan dan anggota pansus memperhatikan seluruh masukan tersebut. "Kami catat untuk kemudian nantinya ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan eksekutif," ungkap istri Imam Priyono ini.

Dia mempersilakan peserta RDPU menyampaikan berbagai unek-unek, saran dan pendapat agar pembahasan raperda menjadi semakin komprehensif. "Masukan itu sangat diperlukan pansus," katanya. (lan/kus/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005